



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

DAMPAK KENAIKAN BBM

**BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme
dan Neokolonialisme**
S. Aminah

**Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi
dan Pergeseran Peran Perempuan**
Bagong Suyanto

**Ancaman Meluasnya Kemiskinan
akibat Kenaikan BBM**
Karnaji

**Kebijakan Kesehatan di Indonesia :
Antara Market Approach dan Social Equity Model
(Perspektif Ekonomi Politik Kebijakan Publik)**
Adri Patton

**Personal Influence and Power Distance:
Acknowledging Local Culture Influence in Conceptualising
Public Relations Practices in Asian Countries**
Ratih Puspa

**Analisis Daya Dukung Gua
untuk Pengembangan Ekowisata
(Studi Kasus: Gua Gong dan Gua Tabuhan, Kabupaten Pacitan)**
Chafid Fandeli, Tjahyo Nugroho Adji

Pembangunan Ekowisata di Indonesia
Nur Emma Suriani, Nurdin Razak

**Resensi Buku
Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku**
Doddy S. Singgih

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 03 1-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Apabila membicarakan kenaikan BBM, banyak pakar diberbagai forum diskusi telah menjelaskan dan menegaskan bahwa efek yang ditimbulkan sangat multidimensional bahkan kehadiran kenaikan BBM dapat berpengaruh di kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, hukum, sosial. Bahkan jauh sebelum kebijakan kenaikan BBM diberlakukan para analis ekonomi meramalkan ambruknya perekonomian masyarakat hanya tinggal menunggu waktu saja.

Efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM di pasaran bagaimana pun membuat masyarakat miskin makin terhimpit tanpa bisa melakukan reserve untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Ketika harga sejumlah barang kebutuhan pokok mulai merambat naik, sementara perkembangan sektor riil justru tengah lesu, maka yang terjadi kemudian adalah beban baru yang memberatkan keluarga-keluarga miskin di desa-desa miskin yang sehari-harinya sudah terbiasa hidup pas-pasan. Alih-alih kebijakan pencabutan subsidi BBM bakal membuat jumlah penduduk miskin berkurang seperti diinginkan pemerintah, yang terjadi di lapangan pasca kenaikan harga BBM adalah beban baru yang mesti ditanggung penduduk miskin menjadi makin berat. Dalam kenyataan tidak jarang terjadi penduduk yang semula miskin menjadi makin miskin dan berkekurangan karena mereka makin tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup yang makin berat.

Seperti biasanya, dengan dalih untuk mengurangi beban APBN yang semakin berat –karena harga minyak dunia mulai melambung di atas ambang psikologis– di satu sisi dan membantu masyarakat miskin di sisi lain, pemerintah mulai mengeluarkan jurusnya untuk meredam kemarahan masyarakat miskin dengan program BLT (bantuan langsung tunai) hasil dari dana kompensasi kenaikan BBM. Meskipun hanya Rp 300.000 per tiga bulan, untuk mengentas masyarakat miskin tentu saja dana sebesar itu belum cukup membantu meringankan beban masyarakat, karena bahan pokok sudah mulai naik lebih dahulu bahkan sebelum pengumuman kenaikan BBM disosialisasikan oleh pemerintah. Sekali lagi program-program yang digulirkan pemerintah acapkali bersifat karitatif dan tambal sulam sehingga tidak sampai menyentuh ke akar permasalahan sesungguhnya.

Berbagai artikel, serta hasil penelitian yang diolah redaksi tidak lain adalah berbagai efek yang terjadi semenjak digulirkannya kebijakan kenaikan BBM, selain terdapat berbagai tulisan di luar topik utama, antara lain: pada lingkup politik S. Aminah membahas BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme; kemudian Bagong Suyanto mengulas tentang Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi dan Pergeseran Peran Perempuan; Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM oleh Karnaji; Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Antara Market Approach dan Social Equity Model dipaparkan Adri Patton; Ratih Puspa menyajikan Personal Influence and Power Distance: Acknowledging Local Culture Influence In Conceptualising Public Relations Practices In Asian Countries; Analisis Daya Dukung Gua untuk

Pengembangan Ekowisata oleh Chafid Fandeli dan Tjahyo Nugroho Adji; Nur Emma Suriani dan Nurdin Razak membahas tentang Pembangunan Ekowisata di Indonesia serta resensi buku Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku oleh Doddy Sumbodo Singgih.

Harapan redaksi semoga keberadaan *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide demi perbaikan proses pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Redaksi

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2006:
Agenda Permasalahan Tahun 2006

BBM DALAM PERGULATAN SKENARIO NEOLIBERALISME DAN NEOKOLONIALISME

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme

S. Aminah

1

Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi dan Pergeseran Peran Perempuan

Bagong Suyanto

15

Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM

Karnaji

27

Kebijakan Kesehatan di Indonesia :

Antara Market Approach dan Social Equity Model (Perspektif Ekonomi Politik Kebijakan Publik)

Adri Patton

41

Personal Influence and Power Distance:

Acknowledging Local Culture Influence in Conceptualising Public Relations Practices in Asian Countries

Ratih Puspa

57

Analisis Daya Dukung Gua untuk Pengembangan Ekowisata (Studi Kasus: Gua Gong dan Gua Tabuhan, Kabupaten Pacitan)

Chafid Fandeli & Tjahyo Nugroho Adji

67

Pembangunan Ekowisata di Indonesia

Nur Emma Suriani & Nurdin Razak

81

Resensi Buku

Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku

Doddy S. Singgih

95

PEMBANGUNAN EKOWISATA DI INDONESIA

Nur Emma Suriani & Nurdin Razak

Dosen Program Studi Pariwisata Jurusan Sosiologi FISIP Unair

Abstract

Potential of Ecotourism development in Indonesia is not only based on natural resources; biology, geography and immeasurable, but it is also based on cultural resources: ethnic, tradition, and other cultures. This is very important because early tourism planning entangling local society can reduce environmental problem and socio-cultural problem in tourism. In next development of Indonesia tourism, there is nothing wrong if we start rethinking the opportunity of development in urban tourism.

Keywords: *ecotourism development, tourism planning, urban tourism*

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor terdepan dalam item non migas selama berahun-tahun. Selain itu, sektor ini juga telah banyak berkontribusi terhadap perekonomian lokal di banyak wilayah, melalui pengeluaran dari wisatawan domestik.

Kunjungan internasional di tahun 2001 totalnya 5.153.620, meningkat 1,77% dari tahun sebelumnya. Awalnya diproyeksikan bahwa di tahun 2001 total kunjungan bakal meningkat 5,4 juta, sebagaimana diindikasikan oleh pertumbuhan selama paruh pertama dan kuartal ketiga dari tahun tersebut. Pengaruh dari peringatan 911 terhadap pariwisata global rupanya berpengaruh kecil bagi Indonesia yang memiliki pasar internasional yang beragam serta dominasinya di pasar Asia Pasifik. Total devisa mengalami penurunan sedikit karena menurunnya pasar dari Eropa dan AS selama kuartal akhir.

Total jumlah wisatawan domestik sekitar separuh dari populasi total; di tahun 2000 jumlahnya 109,4 juta orang bepergian di dalam negara dan jumlah perjalanan sebanyak 143,9 juta.

Total pengeluaran wisatawan domestik pada saat itu Rp 77,6 triliun (lebih dari 7 milyar USD) dibandingkan dengan USD 5,7 milyar dari wisatawan mancanegara pada periode yang sama.

Dengan suatu perbedaan dalam pola pengeluarannya, wisatawan manca negara dapat membuat dampak berbeda pula terhadap ekonomi lokal dibandingkan dengan wisatawan domestik. Wisatawan domestik paling banyak mengeluarkan uang untuk transportasi (43%), belanja (14%) dan lebih rendah lagi porsi biaya untuk konsumsi di perjalanan karena dibawa dari rumah. Makanan yang dibeli di tujuan 14%, dan kurang dari 7% untuk akomodasi.

Pengeluaran wisatawan mancanegara

paling banyak masuk ke sub sektor akomodasi, terhitung 21,77% dari total penerimaan, lebih rendah 10% dari setiap makanan, belanja, dan penerbangan domestik.

Menurut hitungan nasional, selama tahun 2000, pariwisata telah menyumbangkan 9,27% terhadap total hasil nasional; 9,36% bagi total nilai tambah; 9,87% bagi total upah serta gaji dan 8,29 bagi pajak tidak langsung. Pariwisata turut menyerap tenaga kerja bagi 8,11 dari total angkatan kerja. Dalam beberapa kasus kecuali untuk pajak tidak langsung, wisatawan domestik menyumbangkan lebih dari yang disumbangkan wisatawan mancanegara. Totalnya nilai konsumsi wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, termasuk outbound, jasa dan barang kebutuhan di tahun 2000 sejumlah Rp 172,6 milyar, terutama masuk ke transportasi domestik, akomodasi, restoran dan jasa wisata lain.

Kebijakan Pariwisata Nasional

Kebijakan pariwisata nasional sebagaimana ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kementerian antara lain menjaga Indonesia sebagai tujuan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang multi kunjungan. Pariwisata dipandang sebagai suatu kendaraan bagi pembangunan regional dan nasional sejalan dengan pengembangan di tingkat lokal, bukan sekadar mengembangkan pariwisata saja. Keputusan menaruh Budaya dan Pariwisata di bawah suatu "akar" dimaksudkan bahwa pengembangan pariwisata juga mampu menyumbang peningkatan pembangunan dan pengayaan budaya Indonesia yang plural, bukannya sebagai jalan bagi budaya untuk jadi

komoditas.

Berdasar pada nilai-nilai yang telah disebutkan, fakta dan gambar, wisatawan domestik ditempatkan di dalam garis depan program pengembangan pariwisata. Orang-orang Indonesia tidak hanya diminta menjadi tuan rumah yang baik, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk menjadi wisatawan yang baik, mengunjungi sahabat, keluarga, dan kolega di propinsi lain, pulau lain, dan wilayah lain negara yang mempunyai kultur dan setting alam yang berbeda. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga persatuan antar kelompok etnis yang berbeda.

Kita akan melihat Bali, yang dikenal sebagai surga pariwisata, bahkan lebih terkenal ketimbang Indonesia sendiri. Bali diharapkan dapat menjadi alat promosi bagi tujuan wisata lainnya, dan akan membantu mengembangkan tempat-tempat cantik serta unik dengan sumber daya yang lebih sedikit bagi industri selain pariwisata.

Pengembangan pariwisata secara umum serta ekowisata diharapkan menjadi model bagi peningkatan usaha skala kecil dan menengah serta model bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Adanya perhatian besar terhadap pariwisata internasional, membuat kita perlu mengatur perjalanan di kawasan, yang memiliki porsi dominan bagi pasar internasional Indonesia. Dengan sumber daya yang kita punya, khususnya dalam mengatur wilayah tujuan ekowisata bagi pasar yang mapan, pengembangan akan segera kembali ke tujuan semula.

Ekowisata dipandang sebagai sebuah model bagi integrasi pariwisata dan tujuan konservasi, merupakan suatu model bagi pengembangan berbiaya efisien selama waktu sulit, suatu model

bagi publik, alat pendidikan bagi wisatawan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan budaya, serta sebuah model pemberdayaan komunitas, sebagai tolok ukur pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Ekowisata di Indonesia

Sementara pariwisata dipertimbangkan sebagai sebuah industri, sebagai suatu pengalaman manusia atau sebagai subyek kajian akademis, pariwisata adalah suatu undertaking multi-sektor. Realisasi pariwisata di banyak tempat melibatkan banyak pihak: pemerintah, pusat baik lokal, perusahaan privat berbagai skala dan jenis usaha, komunitas, LSM, dan seluruh tenaga profesional. Ekowisata sebagai satu jenis khusus pariwisata di Indonesia, yang menjadi perhatian banyak Kementerian Pemerintah sebaik kelompok kepentingan lainnya.

Semenjak ekowisata mempunyai hubungan langsung dengan lingkungan, Kementerian Lingkungan merupakan institusi terdepan yang menghasilkan strategi nasional bagi ekowisata. Bahkan mereka mendefinisikan lingkungan sebagai lingkungan alam itu sendiri, seperti halnya sosio-budaya, mereka memfokuskan strategi terhadap pengembangan ekowisata dengan titik berat pada lingkungan alam. Departemen Kehutanan, pada umumnya merupakan juru bicara bagi hutan dan wilayah konservasi, peduli terhadap pengembangan ekowisata di wilayah konservasi lindung.

Departemen pemukiman melakukan subordinasi dengan pemerintah lokal yang seharusnya merencanakan dan mengatur pembangunan di yurisdiksi

kehormatan mereka, memberikan acuan pembangunan ekowisata bagi pemerintah lokal.

Menteri pariwisata dan kebudayaan mendefinisikan ekowisata melalui pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk didalamnya aspek budaya sebagai substansi penting dalam ekowisata. Peran menteri pariwisata dan kebudayaan adalah mendukung pembangunan, diantaranya adalah melakukan kontrol terhadap implementasi dan praktik ekowisata yang dilaksanakan beriringan dengan kepentingan semua partai. Termasuk didalamnya pemerintahan lokal dan Menteri lingkungan hidup yang melakukan fungsinya seperti layaknya organisasi non pemerintah. Menteri pariwisata dan kebudayaan juga bertanggung jawab terhadap promosi produk ekowisata di pasar domestik dan internasional.

Walaupun ekowisata telah muncul sebagai bentuk baru produk ekowisata pada tahun 1980-an, saat pariwisata sedang mencari produk khusus untuk mengisi jati diri mereka. Dan hal ini beriringan dengan pergerakan kelompok pecinta lingkungan, terjadi setelah tahun 1991 ketika hal ini menjadi populer di Indonesia. Pada tahun 1991 konferensi Pata di Bali menempatkan istilah ekowisata pada pokok bahasan, dan selanjutnya menjadi kepentingan industri pariwisata Indonesia.

Perhatian pemegang multikekuasaan telah membuat beberapa tujuan ekowisata menjadi mengedepan, dan pembangunan kompone pariwisata yang berbeda, sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik pariwisata yang bagus dan berkembang.

Tujuan pariwisata seperti Togean

yang terletak di Celebes Tengah, merupakan salah satu yang terbaik pada kategori proses pembangunan. Dimana masyarakat lokal terlibat secara langsung sejak awal perencanaan pembangunan. Komunitas tersebut terlibat dan diberdayakan, demikian juga dengan wisatawan asing yang sedang berkunjung. Suatu tujuan pariwisata yang bergengsi seperti Bali, juga membangun produk ekowisata untuk memenuhi perubahan pariwisata internasional.

Potensi bagi Pengembangan Ekowisata di Indonesia

Potensi pembangunan ekowisata di Indonesia pada umumnya disandarkan pada kekayaan sumberdayanya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan *mega-diversity*. Dalam istilah biodiversitas, Indonesia adalah rumah untuk 10 persen flora berbunga di dunia, 12 persen mamalia, 16 persen amphibi dan reptil, 17 persen burung, 25 persen ikan, dan 15 persen serangga. Merupakan achipelago dengan 17.508 pulau.

Lebih dari satu juta kawasan hutan di Indonesia, juga sebagai indikator potensial, 30 juta diantaranya merupakan hutan lindung, dan 15 juta hektar merupakan cagar alam, yang terdiri dari taman nasional, taman hutan luas, dan taman rekreasi alam. Sekitar 7,3 juta hektar merupakan wilayah konservasi alam, yang didalamnya terdapat kekayaan alam yang dilindungi dan wilayah konservasi binatang yang didistribusikan di beberapa lokasi yang berbeda.

Air Indonesia merupakan rumah sumberdaya bawah air yang berkelas dunia, dengan pengelola beberapa taman nasional laut.

Selain itu, *mega-diversity* yang dimiliki pada sumberdaya biologi, Indonesia juga menawarkan suatu geologi dan geografi yang beragam untuk dieksplorasi. Gua merupakan potensi ekowisata lainnya, tidak hanya mengagumkan secara alam, tapi juga mempunyai nilai historis di dalamnya.

Perbedaan budaya yang meliputi etnis, agama, tradisi dan dimensi budaya yang lain, memperkaya sumberdaya alam kita, karena adanya hubungan antara keduanya dan penciptanya.

Beberapa warisan alam dan budaya kita telah terangkum dalam daftar warisan dunia. Singkatnya, tidak hanya jumlah dan ukuran sumberdaya, tapi juga keanekaragaman dan keunikan kondisi merupakan satu hal yang penting dalam menilai pembangunan ekowisata. Di sisi lain, pertumbuhan populasi yang ada tergantung pada sumberdaya hutan dan sistem perdagangan dunia yang didesain oleh negara maju, dan telah mempengaruhi potensi pembangunan ekowisata kita.

Paksaan dan Ancaman bagi Pembangunan Ekowisata di Indonesia

Indonesia dengan sumberdaya yang melimpah untuk ekowisata, kenyataannya masih jauh dari pasar ekowisata. Lebih jauh lagi, negara yang memiliki lokasi tujuan ekowisata potensial, biasanya jauh dari penanganan komunitas apapun.

Daya akses terhadap keaslian wilayah dengan karakter alamnya yang unik, semakin terbatas jika dibandingkan dengan sumberdaya pariwisata yang lain. Hal ini mendorong industri pariwisata

untuk memilih lokasi yang lebih siap dan lebih mudah di akses bagi pembangunan dan penjualannya.

Rendahnya pemahaman dan kesalahan persepsi terhadap ekowisata sebagai suatu produk pariwisata, diantara pemegang kekuasaan memadukan pemahaman ekowisata seperti halnya wisata alam lainnya yang masih berhubungan. Hal ini mengakibatkan terjadinya masalah dalam pelaksanaan. Selain itu, ekowisata yang telah populer dipermukaan bumi, kemudian digunakan sebagai alat promosi, dan kurang dipahami sebagai suatu konsep produk pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang harus diikuti.

Paksaan lainnya merupakan fragmentasi manajemen yang mengakibatkan beberapa institusi dibebani aspek ekowisata tertentu. Pelaksana memerlukan ijin dari pemerintah lokal dan rekomendasi dari menteri yang bertugas pada bidang pariwisata. Pada saat tertentu, ekowisata sering termasuk dalam wilayah konservasi yang berada di bawah otoritas departemen kehutanan. Suatu perusahaan umum juga dibentuk dengan bantuan Menteri Kehutanan.

Pembangunan aktifitas ekowisata dengan wilayah konservasi dianggap berbahaya, karena hal ini mungkin saja tidak terkontrol di pembangunan yang akan datang, yang pada kenyataannya dilarang.

Pemberdayaan hukum digunakan untuk menghindari beberapa bentuk kekacauan di hutan pada umumnya, dan di wilayah konservasi pada khususnya. Pada umumnya nilai ekonomi wilayah konservasi masih lemah., dimana pada beberapa kasus juga merupakan deposit tambang, diperlakukan untuk memperluas wilayah konservasi.

Wilayah konservasi yang dekat dengan kota besar dan wilayah yang padat penduduknya jarang dikunjungi, sehingga seringkali kapasitasnya berlebih.

Disana juga terdapat kebutuhan untuk mendidik wisatawan ketika memasuki wilayah konservasi agar mereka berlaku secara benar.

Ekowisata juga memerlukan panduan pengetahuan yang berkompeten terhadap teknik panduan, misal pengetahuan atau substansi subyek kunjungan.

Kesulitan terakhir, tapi bukan satu-satunya adalah daya akses, yang didasarkan pada informasi dan relevansi.

Isu-isu Kelayakan

Komisi lingkungan dunia mendefinisikan kelayakan pembangunan sebagai "pertemuan kebutuhan saat ini tanpa kompromi terhadap kemampuan generasi mendatang yang dihadapkan pada kebutuhannya sendiri".

Selanjutnya, pendekatan dikembangkan dan diekspresikan pada Agenda 21 dalam pertemuan dunia pada tahun 1992. sejak itu, banyak pemerintah nasional yang mengadopsi pendekatan tersebut sebagai kebijakan mereka. Konsep yang diajukan juga diadopsi oleh World Tourism Organization: kelayakan pariwisata didefinisikan sebagai "pertemuan kebutuhan pariwisata saat ini dengan kawasan tuan rumah ketika menjaga dan meningkatkan peluangnya di masa depan. Hal ini digambarkan sebagai pimpinan untuk mengelola semua sumber daya yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetik yang dapat dipenuhi ketika memelihara integritas budaya, proses esensi ekologi, diversitas

biologi, serta sistem yang mendukung hidup.

Indonesia telah menempatkan komitmennya pada Agenda 21 untuk Travel dan Pariwisata Parsial. Seiring dengan perhatian terhadap pembangunan pariwisata, program di masa yang akan datang dipandu oleh prinsip-prinsip berikut:

1. Sumberdaya alam, historis, dan budaya serta yang lainnya, untuk pariwisata dikonservasikan bagi penggunaan di masa depan, selama masih memberikan keuntungan bagi komunitas sekarang.
2. Pembangunan pariwisata direncanakan dan dikelola, sehingga tidak mengakibatkan masalah lingkungan ataupun sosialbudaya di wilayah pariwisata.
3. Semua kualitas lingkungan pariwisata dikembangkan dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.
4. Tingginya tingkat kepuasan wisatawan dikembangkan sehingga tujuan pariwisata tersebut akan tetap dapat dipasarkan dan tetap populer.
5. Keuntungan dari pariwisata diperluas melalui kondisi sosial.

Aktivitas Kini dan Langkah ke Depan

Pada tahun 2002, tahun internasional ekowisata, terjadi praktik inventarisasi pariwisata terbaik. Pemerintah Indonesia juga melakukan modifikasi tahun internasional gunung, menjadi suatu tema yang lebih spesifik: tahun vulkanik. Vulkanik merupakan salah satu daya tarik ekowisata terbaik di Indonesia, yang belum/kurang diberdayakan. Panduan praktik terbaik diharapkan penggunaannya sebagai referensi untuk perusahaan yang

baru, ataupun yang lainnya, lahan sempit digunakan sebagai bisnis skala medium yang dijalankan.

Indonesia juga mempersiapkan studi tentang pelaksanaan industri perhotelan yang ramah lingkungan. Substansinya diharapkan akan diadopsi untuk memperkaya program-program studi pariwisata.

Pemerintah pusat sedang bekerja sama dan menyediakan konsultasi bagi pemerintah lokal untuk praktik perencanaan pembangunan pariwisata.

Pada tanggal 27 September juga direncanakan hari pariwisata, apresiasinya ditujukan untuk mereka yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmennya bagi implementasi kelayakan pembangunan.

Tujuannya telah menempatkan desain baru produk pariwisata dengan kelayakan sebagai intinya, hal ini diterjemahkan kedalam pembangunan pariwisata di pedesaan dan mengembangkan lingkup perusahaan kecil dan menengah.

Kerja sama dengan organisasi non pemerintah ekowisata merupakan revitalisasi untuk menempatkan kembali penciptaan atau pembangunan potensi wilayah menjadi satu tujuan ekowisata, atau setidaknya menjadi bagian dari paket keseluruhan ekowisata dalam negeri.

Dengan satu pandangan yang dapat dimengerti di masa depan. Tujuannya juga akan memperkirakan kapasitas keberadaan regulator dan kerangka kerjanya untuk menjadikan suatu ekowisata yang layak.

Pembangunan sumberdaya manusia akan dilakukan melalui pelatihan dan kajian studi untuk membantu proses otonomi pada sektor pariwisata.

Rekomendasi

Memikirkan Kembali Peluang Wisata Pedesaan

Masyarakat pedesaan ditekan untuk menghasilkan pertumbuhan pada restrukturisasi ekonomi, dengan berkurangnya sumbangan dan fasilitas pemerintah, dan ancaman terhadap sumberdaya alam mereka. Wisata pedesaan mengalami peningkatan yang cukup menarik, karena wisata ini digunakan sebagai mekanisme untuk mempertemukan tantangan diatas dengan banyaknya perencanaan. Para akademisi dan praktisi percaya bahwa di masa yang akan datang, wisata pedesaan disejajarkan dengan peluang-peluang ekonomi, sosial, dan politik yang diciptakan melalui pariwisata. Tulisan ini mendiskusikan bentuk terkini pertumbuhan peran pariwisata di Ontario Baratdaya, serta memperjelas dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari pertumbuhan ini. Dengan mencatat tantangan bahwa pariwisata merupakan sesuatu yang terus berubah, 'pasti mempercepat' kerusakan pedesaan, tulisan ini menawarkan pemikiran alternatif tentang peluang-peluang yang dihadirkan oleh wisata pedesaan, dan memberikan panduan pendekatan baru bagi pembangunan pedesaan yang lebih umum.

Kata Pengantar

Teka-teki perubahan pedesaan di Canada telah menjadi topik yang banyak didiskusikan akhir-akhir ini. Lebih jauh lagi, pemahaman tentang perubahan pedesaan juga menyita perhatian banyak teoritis, khususnya praktisi pembangunan masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah untuk memilah-milah komponen yang merespon

perubahan pedesaan di era restrukturisasi global-pariwisata. Perubahan ekonomi, khususnya perubahan praktik pertanian, telah mendorong melomponnya lahan pedesaan dan mengakibatkan jurang dilema, pada umumnya tentang masa depan masyarakat pedesaan. Berkurangnya jumlah pedesaan merupakan masalah bagi pemerintahan modern. Penggunaan pariwisata sebagai cara untuk menghasilkan pertumbuhan adalah respon yang umum. Dalam kerangka kerja tentang pembangunan masyarakat dan pariwisata, sekelompok peneliti dari Brazil dan Canada menemukan bahwa pariwisata dipandang sebagai "kemungkinan penyelamat", tapi juga "berhadapan dengan bahaya" yang sering menghasilkan keuntungan bagi masyarakat lokal dan pembangunan masyarakat yang disebut "masyarakat pinggiran"(2001:1). Tulisan in berkenaan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan riset di Ontario Baratdaya.

Tulisan ini dipilah dalam empat bagian. Pertama, kata pengantar tentang pariwisata di wilayah pedesaan, yang merupakan rangkaian tingkatan bagi analisis melalui pemahaman tentang daya tarik pembangunan pariwisata sebagai mekanisme untuk pertumbuhan pedesaan pada banyak masyarakat. Bagian kedua akan menggambarkan riset yang dilakukan di tujuh masyarakat pedesaan di Ontario Baratdaya, dalam rangka memperjelas masalah-masalah dan isu-isu yang mempengaruhi intensifikasi kontinu pembangunan pariwisata. Dengan menggaris bawahi dampak tertentu pendekatan dorongan pariwisata bagi pertumbuhan dan pemerintah pedesaan, tulisan ini menyarankan peluang-peluang bagi perencanaan pariwisata yang akan

diambil untuk meningkatkan penggunaan, partisipasi, yang secara potensial tidak merusak. Kesimpulan tulisan ini memperkenalkan tingkatan riset yang berikutnya dalam memberikan panduan bagi suatu proses perencanaan pariwisata di masyarakat pedesaan.

Kata Pengantar Pariwisata Pedesaan

Pariwisata pedesaan sepertinyanya dapat didefinisikan dengan mudah sebagai perjalanan ke wilayah pedesaan, tapi peneliti harus menunjukkan bahwa hal ini jauh lebih kompleks (Lane, 1993b). Terdapat variasi contoh dilakukannya pariwisata di wilayah pedesaan, termasuk diantaranya aktifitas alam, festival-festival, peristiwa warisan, pertunjukan dan peristiwa yang bersifat aborigin, agrowisata, pertunjukan seni dan kerajinan, teater masyarakat, dan banyak lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh Lane, pariwisata pedesaan merupakan suatu aktifitas kompleks, dan multi-wajah yang meliputi segala sesuatu dari ladang yang ditujukan bagi pariwisata untuk perjalanan pendidikan, pariwisata yang sehat, serta pariwisata etnik dan ekowisata (1993a). Alasan parsial bagi kompleksitas dengan kesulitan dalam membedakan wilayah pedesaan itu sendiri, khususnya perubahan peran mereka dalam meningkatnya globalisasi ekonomi. Ketika banyak yang mempertanyakan bagaimana mendefinisikan apa saja yang merupakan wilayah pedesaan, fokusnya lebih berkenaan dengan perubahan fungsinya pada ekonomi global ini, Panelli (2001) berpendapat bahwa perubahan politik dan maknanya di wilayah pedesaan, sama pentingnya dengan bentuk ekonomi yang pada umumnya karakter umum dari fungsi mereka. Pemahaman terhadap pariwisata

dan perjalanan ke wilayah pedesaan, selanjutnya menjadi semakin kompleks.

Konteks yang berkaitan dengan pariwisata pedesaan yang telah dibangun merupakan titik awal yang berguna bagi diskusi ini. Perjalanan ke wilayah pedesaan telah menumbuhkan dua alasan yang berkaitan: dari sisi permintaan, orang semakin tertarik terhadap wisata pedesaan dan wisata budaya, dari sisi penawaran, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk memantapkan pembangunannya. Ketika pertanyaan tentang perjalanan ke wilayah pedesaan menjadi menarik (lihat Weiler dan Hall 1992), tujuan penulisan ini lebih difokuskan pada peran pemerintah dalam pembangunan. Di Ontario, pemilihan Harris, pemerintah konservatif dan 'Revolusi yang masuk akal' mengintensifkan suatu proses skala dibalik peran pemerintah dalam pertumbuhan dan pembangunan masyarakat pedesaan. Ide perencanaan masyarakat lokal pada umumnya dilakukan berdasarkan perspektif pemerintahan masyarakat campuran, yang banyak bertugas berdasarkan pembangunan dan pendanaan mereka sendiri. Bentuknya tidak unik untuk Ontario, dan sat itu Healy berpendapat bahwa besarnya pengaruh dari strategi neoliberal pada promosi pengusaha dari pada bentuk regulasi pemerintahannya (1997, lihat juga Harvey 1989). Sebagai pemerintahan yang menangani masyarakat pedesaan, ia dipaksa memikirkan jasa, pariwisata membuat kepercayaan meningkat. Hal ini banyak terjadi di dunia ini. Pada tahun 1994, laporan yang diberikan oleh organisasi untuk pembangunan dan kerja sama ekonomi, menyarankan agar pariwisata memiliki suatu peran vital untuk

pembangunan pedesaan di masa depan

Selama beberapa tahun, jumlah wilayah pedesaan mengalami kehilangan populasi dan penurunan jasa layanan. Saat ini masalah tersebut diperluas dengan perubahan yang diakibatkan oleh berkurangnya pekerjaan dan menurunnya pendapatan dari sektor perladangan. Sebaliknya, pariwisata telah berkembang menjadi sesuatu yang menjanjikan, aktivitas meningkat dengan cepat, dan telah menjadi faktor yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara yang telah dibangun. Sedemikian pentingnya untuk mendeterminasikan apakah potensi pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai strategi untuk pembangunan pedesaan, khususnya dengan menggambarkan gelombang kepentingan kota pinggiran, nilai-nilai tradisional kehidupannya, serta landasan dan arsitektur warisan.....(Pariwisata) telah terbukti sebagai mesin yang memiliki kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi—melakukan transfer kapital, pendapatan, pekerja dari industri, pedesaan, serta wilayah yang dibangun untuk kawasan non-industri. (1994: 5-7)

Hubungan antara pariwisata dan pembangunan ekonomi terus berkembang, baik dari segi kepentingan sebagai strategi pembangunan dan juga sebagai suatu fokus bagi penelitian (lihat Aronsson 2000; Blank 1989; Bouquet dan Winter 1987; Britton 1991; Butler et al.

1998; Hall dan Jenkins, 1998; Ilbery 1998; Keane 1992; Luloff et al. 1993; Mitchell 1998&2000; Ramaswamy dan Kluntzel 1998). Sesi berikutnya difokuskan pada diskusi uji terhadap empat masyarakat pedesaan di Ontario Baratdaya¹.

Pembangunan Pariwisata dan Masalah-masalah dalam Masyarakat Pedesaan²

Perhatian pada dampak pembangunan pariwisata untuk anggota masyarakat pedesaan mengalami peningkatan (Bourke dan Luloff 1995; Perdue, Long dan Allen 1987 & 1990; Pizam 1978; Smith dan Krannich 1998). Penelitian terhadap empat masyarakat pedesaan pada tahun 1999 mendukung penemuan ini. Interview dilakukan terhadap lebih dari 100 responden yang berasal dari masyarakat pedesaan. Keempat masyarakat ini diseleksi berdasarkan posisinya, diadopsi dari pandangan model alur tujuan hidup Butler (1980). Perhatian ditujukan untuk identifikasi dan interview anggota masyarakat bisnis (bisnis pariwisata dan bisnis non-pariwisata), berkenaan dengan pemukiman, representasi sekelompok jasa, dan relawan masyarakat, serta politisi lokal. Dari semua itu, ketika dipertanyakan keuntungan pariwisata terhadap masyarakat mereka, responden lebih suka mendiskusikan berdasarkan faktor-faktor ekonomi. Tenaga kerja, pertumbuhan

¹ Karena kepentingan, tulisan ini tidak akan mendiskusikan metodologi yang mendukung penelitian ini. Untuk lebih detail, lihat Reid, D.G., J. Taylor dan H. Mair. (200a) Rural tourism development: research report. School of Rural Planning and Development, University of Guelph, Guelph, Ontario.

² Suatu pandangan yang sama dengan bagian ini dihadirkan Annual World Leisure dan Recreation Congress ke-6, Bilbao, Spain, July, 2000.

ekonomi, perputaran terhadap dukungan jasa, dan pembangunan bisnis pada umumnya diberikan sebagai bukti bahwa pariwisata membantu berkembangnya perekonomian masyarakat pedesaan. Ketika dipaksakan untuk memahami beberapa keuntungan-keuntungan non-ekonomi, biasanya responden mengidentifikasi contoh kebanggaan masyarakat, pendidikan dan interaksi budaya, insentif untuk menjaga agar masyarakat tetap tertata rapi, dan mampu untuk memastikan dukungan terhadap bisnis dan jasa yang berbeda. Tujuan lebih jauh tentang penelitian ini adalah memiliki responden yang mampu mengidentifikasi isu-isu, dan peduli terhadap pembangunan pariwisata di masyarakat mereka. Kepedulian dan isu-isu dihasilkan dari pembangunan pariwisata yang meliputi kemacetan, kebisingan, dan rendahnya akses kesenangan, rendahnya privasi, perasaan akan hilangnya keseimbangan, ancaman terhadap pedesaan, serta ketakutan akan hilangnya kontrol terhadap industri pariwisata. Konflik yang terjadi pada dunia pariwisata yang berhubungan dengan aktivitas yang terjadi, seringkali dimanifestasikan dalam petisi, dan ruang pertemuan kota, tapi mereka juga dimainkan di sektor umum, berhadapan dengan konfrontasi, dan permusuhan terbuka, rasa anti pariwisata, dan juga bentuk-bentuk pengrusakan.

Analisis terhadap keempat wilayah tersebut menyarankan agar masyarakat pariwisata, memberikan perhatian langsung pada isu-isu substansi yang menyebabkan ketegangan dan konflik masyarakat. Sebagian besar partisipan dalam kajian ini menyarankan agar hal ini dapat ditujukan untuk isu-isu substansi yang meliputi arus lalu lintas, lahan parkir,

waktu bisnis yang konsisten dan produk pariwisata yang alami (wisata masal) sehingga mereka akan berhubungan langsung dengan pengganggu utama. Responden pada tiap masyarakat kajian mengungkapkan bahwa kreasi suatu rencana pariwisata akan menjadi langkah utama dalam menyelesaikan masalah mereka. Bagaimanapun juga hal ini menjadi jelas, bahwa tidak ada proses yang tidak dapat didefinisikan, dan secara luas dipercaya bagi pembuatan keputusan yang diperlukan untuk menciptakan rencana pariwisata ini.

Pembangunan pariwisata di masing-masing masyarakat kajian studi masyarakat telah selangkah lebih maju, dan hal ini pada umumnya ditujukan untuk pemukiman yang tidak didukung dan direncanakan. Pembangunan pariwisata yang terjadi pada lingkungan bisnis lokal secara potensial telah menunjukkan kerusakannya (Mitchell, 1998). Perhatian akan dibangun dengan masyarakat sebagai anggota yang memperoleh keuntungan dari pariwisata, sedangkan yang lainnya tidak termasuk, miskinnya perencanaan arus lalu lintas akan mengakibatkan kekacauan dan frustrasi, hal ini akan menjatuhkan pandangan terhadap jasa layanan lokal (atau terjadi kenaikan biaya); infasi yang dilakukan tanpa adanya cek terhadap pertumbuhan pariwisata akan mengakibatkan meningkatnya sekelompok kecil masyarakat yang dikucilkan. Perhatian masyarakat ini mulai mempengaruhi kesehatan (dukungan) masyarakat.

Dengan tidak memperhatikan apakah responden memandang pembangunan pariwisata baik untuk masyarakat, kejahatan yang diperlukan, ataukah suatu pendekatan tentang

pembangunan harus dihindari, dengan lebih dekat responden menyarankan bahwa perencanaan pembangunan pariwisata merupakan sesuatu yang esensial, dan seringkali mengabaikan aktivitasnya. Responden mengindikasikan bahwa dilakukannya uji perencanaan dan pandangan dipercaya sebagai sesuatu yang diperlukan bagi masalah pembangunan pariwisata, dan menjembatani perbedaan antara yang mendukung pariwisata, dan yang menginginkan pembangunan terbatas, serta yang tidak menginginkan sama sekali. Walaupun pemilik bisnis dan yang ditunjuk untuk melakukan secara langsung berasal dari instansi pembangunan pariwisata, mereka menyarankan bahwa seharusnya mereka dikontrol, atau diberikan panduan untuk memastikan konsistensi dan kualitas pembangunan pariwisata, tapi juga menjaga pembangunan yang dilakukan, yang berkenaan dengan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketika dipertanyakan potensi mekanisme yang ditujukan pada perhatian, konflik dan pemahaman terhadap tujuan di masa yang akan datang, responden lebih menyarankan pada perlunya dilakukan perencanaan. Bukan berdasarkan pada pendekatan masyarakat, bagaimanapun, dapat mendorong pada pemukiman yang tidak memuaskan, mengakibatkan perilaku yang dapat mempengaruhi imajinasi dan pola kehidupan masyarakat, sehingga mengurangi makna keberadaan wilayah ini. Disini jelas diperlukan proses awal yang mengizinkan kelompok masyarakat yang bervariasi untuk melakukan konfrontasi secara kolektif terhadap gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata itu sendiri. Sesi

selanjutnya memperkenalkan riset berikutnya di tiga wilayah masyarakat lainnya yang ditujukan untuk pembangunan suatu proses.

Pendekatan Alternatif bagi Perencanaan Pariwisata Pedesaan

Dengan isu yang tidak terangkum dalam riset pendahuluan, banyak pertanyaan yang muncul bagi peneliti maupun perencana pariwisata pedesaan. Jika masyarakat merupakan suatu bagian integral produk pariwisata, bagaimana mungkin perencana menciptakan suatu pendekatan yang lebih menyeluruh dan integratif bagi perencanaannya? Beberapa peneliti menyadarinya sebagai fondasi pariwisata yang berkesinambungan (Hunter, 1997; lihat juga Bramwell dan Sharman 1999). Dapatkah menjadi pariwisata yang berkesinambungan? Bagaimana hal tersebut direncanakan? Khususnya penggunaan pendekatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipengaruhi oleh kerja Hunter (1997). Dia berargumen bahwa pariwisata yang berkesinambungan lebih efektif digunakan sebagai suatu "paradigma adaptif" selama bisa dipergunakan pada bentuk dan tempat yang berbeda, tergantung pada bagaimana seseorang menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dipertanyakan. Hunter melihat pariwisata yang berkesinambungan sebagai suatu rangkaian (1997: 859-863), dimana suatu masyarakat seharusnya memiliki suatu "tugas pariwisata" sehingga mereka akan memutuskan sumberdaya apa yang diperlukan untuk mendapatkan penghasilan. Tujuan lain rangkaian, "kelemahan pariwisata" atau suatu ekologi yang mendahulukan prespektif, yang

secara aktif akan mengecilkan minat pariwisata yang bertujuan untuk menjaga wilayah alam yang ingin dilindungi oleh masyarakat. Posisi ini dapat diperluas sampai ke perhatian ekologi yang mencakup pelestarian budaya dan kehidupan masyarakat pedesaan.

Perlu dicatat di sini bahwa tiap langkah yang diambil dalam rangkaian ini melibatkan pelestarian dan kontrol, tapi perpaduan yang dihasilkan oleh masyarakat masih dipertanyakan dan dapat berubah seiring dengan waktu. Suatu masyarakat yang memutuskan untuk menarik wisatawan dalam jumlah besar untuk memperoleh penghasilan, secara instan, dapat bergerak seiring dengan rangkaian yang menetapkan bahwa kontrol (yang dideterminasikan oleh masyarakat) digunakan sebagai pelindung kerusakan total, sampai hal ini dapat ditingkatkan pada level perlindungan atau kontrol. Perubahan hakikat pariwisata mengindikasikan bahwa pariwisata dapat diterima dengan baik untuk memastikan keperluan proteksi, dan mungkin bersedia untuk melakukan peran aktif untuk memantapkan hal ini (Hunter, 1997; Aramberi, 2001).

Pertanyaan yang mungkin muncul tentunya bagaimana hal ini diletakkan. Dalam rangka penelitian dengan tiga anggota masyarakat pedesaan yang berbeda di Ontario Baratdaya, disarankan bahwa titik awal yang potensial adalah menciptakan sebagian pandangan masyarakat yang dapat membantu dibangunnya kepercayaan antara anggota masyarakat dengan peran yang sejajar dalam memimpikan masyarakat masa depan mereka. Yang penting, fokus bagian ini, tidak ditujukan murni pada pariwisata itu sendiri, tapi pada masyarakatnya.

Partisipan-partisipan mengikuti model suatu konferensi riset, seperti yang ditetapkan oleh Emery dan Purser (1996) dan menggunakan waktu untuk menggambarkan imajinasi masyarakatnya, mendiskusikan hasil gambaran mereka, kemudian membuat keputusan kolektif tentang apa yang ingin dilindungi oleh masyarakatnya, membangun dan melanjutkannya. Ketika proses yang dilakukan memerlukan fasilitas, diberikan perhatian untuk memastikan bahwa partisipasi wilayah tersebut dikontrol melalui keputusan yang diambil secara konsensus. Tahapan selanjutnya, uji penilaian masyarakat, melibatkan celah pembangunan pariwisata untuk menciptakan pandangan dan memilah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ketika penelitian berada pada tahapan awal, banyak instansi menarik yang dikolaborasikan, menghasilkan pemahaman dan penghargaan pada semua bagian yang ada dalam uji penelitian. Partisipan dalam dua uji ini telah mendeterminasikan bahwa hal ini harus dilakukan lagi terhadap banyak bentuk masyarakat yang mungkin ada. Tantangan utamanya terletak pada lahirnya inisiatif dan energi untuk mendesain sesuatu yang fleksibel, masyarakat yang didasarkan pada proses perencanaan pariwisata, tapi tujuan utamanya berkenaan dengan suatu pembelian, yang dapat memastikan kemandirian dan tujuannya sendiri.

Kesimpulan

Pada kerja rekreasi kolaborasi dan perencanaan jasa taman, Hope dan Dempsey (2000) telah menggunakan konferensi keputusan masyarakat dan menyimpulkan bahwa tipe perencanaan ini:

Seharusnya menghadirkan keinginan masyarakat, proyeknya secara imajinatif merupakan apa yang seharusnya, dan menyadari apa yang mungkin secara realistis. Secara aktif seharusnya melibatkan pemegang kekuasaan dan mencari konsensus yang dibangun disekitar nilai-nilai masyarakat lokal untuk memperoleh komitmen yang sesungguhnya untuk diimplementasikan. (p.63-4)

Sebagai perencana dan peneliti yang menyelidiki peran pariwisata pada masyarakat pedesaan, seharusnya tidak hanya memperhatikan pemain-pemain dan kepentingannya dalam masyarakat, tapi juga memperhatikan konteks yang ada. Seperti telah disebutkan di awal, pariwisata telah diperkenalkan pada sekelompok kecil masyarakat diseluruh dunia sebagai percepatan pasti bagi kerusakan pembangunan. Pariwisata telah dipertanyakan untuk menghasilkan sejumlah kepentingan bagi masyarakat, dan hal ini harus ditanggapi secara serius. Misal, sebagai bagian strategi tugas pedesaan dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah pedesaan,

pemerintah propinsi Ontario menganggarkan \$ 30 juta untuk proyek-proyek pedesaan, lebih dari \$ 7 juta dipergunakan untuk proyek-proyek pariwisata. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa hampir sepertiga dana pembangunan pedesaan ditujukan untuk pertumbuhan pariwisata pedesaan. Seruan pariwisata bagi pembangunan pedesaan dikokohkan dengan pertumbuhan bisnis yang ideal, sepanjang pemerintah masih memainkan peranan yang lebih kecil. Seperti yang telah ditunjukkan diatas, bagaimanapun, secara bisnis, dorongan pariwisata dihadapkan pada masalah-masalah masyarakat pedesaan, yang memerlukan penanganan yang lebih hati-hati jika dibandingkan dengan pemahaman sebelumnya. Pendekatan jangka panjang untuk pembangunan pariwisata yang sehat seiring dengan waktu yang diinginkan, memerlukan sumberdaya dan keahlian untuk memantapkannya, serta dibangun dari konsensus dan dukungan serta banyak bagian serta perspektif yang mungkin ada di masyarakat. Penelitian yang digambarkan disini tahapan untuk tujuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Allcock, A., Jones, B., Lane S., & Grant J., *National Ecotourism Strategy* (Canberra ACT: Commonwealth Department of Tourism, 1994).
- Butler, R. W., The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources. *Canadian Geographer* 24, 5-12., 1980.
- Ceballos-Lascurain, H., Introduction. In M. Epler-Wood and K. Lindberg (Eds.), *Ecotourism: A Guide for Planners and Managers*, Volume 2 (pp. 7-10). (North Bennington VT: The Ecotourism Society, 1998).
- Carlsen, J., Economic Evaluation of recreation and tourism in natural areas: a case study in New South Wales, Australia. *Tourism Economics*, 3(3), 227-239., 1997.
- Driml, S., & Common, M., Economic and Financial Benefits of Tourism in Major Pro-

- ected Areas. *Australian Journal of Environmental Management*, 2(2), 19-39., 1995.
- Eagles, P. F. J., Understanding the Market for Sustainable Tourism. In S. F. McCool & A. E. Watson (Eds.), *Linking tourism, the environment and sustainability*. (pp 25-33, USDA Forest Service, General Technical Report INT-GTR-323) (Ogden UT: Intermountain Research Station, 1995a).
- Eagles, P. F. J., *International Ecotourism Management: Using Australia and Africa as Case Studies*. Paper presented at Protected Areas in the 21st Century: From Islands to Networks, World Commission on Protected Areas, Albany, WA, Australia. Page 41 of 43, 1998.
- Eagles, P. F. J., & Higgins, B. R., Ecotourism Market and Industry Structure. In M., 1998.
- Epler-Wood and K. Lindberg (Eds.), *Ecotourism: A Guide for Planners and Managers*, Volume 2 (pp. 11-43). North Bennington, VT: The Ecotourism Society., 1998.
- Eagles, P. F. J., McLean, D., & Stabler, M. J., Estimating the Tourism Volume and Value in Parks and Protected Areas in Canada and the USA. *George Wright Forum* 17(3): 62-76., 2000.
- Eagles, P. F. J., & Wind, E., The Advertising of Canadian Ecotours in 1992. *Journal of Applied Recreation Research*, 19(1), 67-87., 1994.
- Ethos Consulting., *Adventure Travel in Eastern Canada*. Ottawa, ON: Tourism Canada., 1990.
- Filion, F., Foley, J. P., & Jaquemot, A. J., *The Economics of Global Ecotourism*. In. Munasinghe & J. McNeely (Eds.), *Protected Areas Economics and Policy: Linking Conservation and Sustainable Development*. (pp. 235-252). (Washington DC: WorldBank, 1994).
- Global Environment Facility., *Operational Strategy* (Washington DC: USA, 1996).
- Goodwin, H. J., Kent, I. J., Parker, K., & Walpole, M. J., *Tourism, Conservation & Sustainable Development: Volume I, Comparative Report* (1 of 4 Volumes), published, 1997a.
- The Durrell Institute of Conservation and Ecology, The University of Kent, Canterbury, UK.
- Goodwin, H. J., Kent, I. J., Parker, K., & Walpole, M. J., *Tourism, Conservation & Sustainable Development: Volume IV, The South-East Lowveld, Zimbabwe*. (1 of 4 Volumes), Unpublished (The Durrell Institute of Conservation and Ecology, The University of Kent, Canterbury, UK, 1997b).